

BAB V

KESIMPULAN

Dalam penulisan ini menggambarkan bagaimana organisasi internasional yang bergerak pada bidang kemanusiaan yaitu HRW dalam menegakkan HAM pada kebijakan war on drugs Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Pada kebijakan war on drugs diketahui banyaknya korban terbunuh pada saat implementasi kebijakan tersebut melalui operasi polisi. Implementasi kebijakan war on drugs yang menyebabkan ribuan tersangka dan pelaku narkoba terbunuh tidak semua didasarkan pada proses hukum yang berlaku. Operasi polisi terkait narkoba diketahui nampak sistematis, terencana dan terorganisir oleh otoritas yang mengindikasikan adanya kejahatan atas kemanusiaan.

HRW membela hak-hak orang di seluruh dunia. HRW menyelidiki pelanggaran, mengungkapkan fakta secara luas, dan menekan mereka yang memiliki kekuatan untuk menghormati hak dan menjamin keadilan. HRW merupakan hasil dari perubahan Helsinki Watch yang didirikan pada tahun 1978. Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pemerhati HAM, HRW memiliki misi yaitu membela hak-hak manusia diseluruh dunia. Dalam menjalankan perannya sebagai penegak HAM, HRW melakukan investigasi yang kemudian hasilnya akan digunakan untuk melakukan advokasi terhadap suatu kebijakan atau perubahan. HRW merupakan suatu *international human right movement* karena sifat gerakannya yang mengglobal dan memiliki jaringan internasional sebagai alat advokasi.

Tindakan advokasi HRW dalam menegakkan HAM di Filipina pada kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte sesuai dengan kajian ilmu hubungan internasional yang menjelaskan suatu jaringan internasional. Jaringan itulah

yang menjelaskan bagaimana proses hubungan internasional dapat dilakukan tidak hanya oleh para pelaku politik tapi oleh semua warga dunia. HAM juga merupakan suatu isu internasional yang mana kasus pelanggaran HAM hampir terjadi diseluruh dunia. HAM tidak hanya memerlukan perhatian sebagian orang saja, namun seluruh dunia bertanggungjawab atas perlindungan terhadap HAM. dengan adanya suatu jaringan internasional, maka suatu isu dapat ditangani secara lebih baik. Dalam hal ini HRW selaku pergerakan HAM memanfaatkan jaringan internasional melalui advokasi meneggakkan HAM pada kebijakan war on drugs Presiden Rodrigo Duterte.

Presiden terpilih yaitu Rodrigo Duterte mengeluarkan kebijakan *war on drugs* yang dijalankan dengan cara membunuh tersangka dan pelaku narkoba dan kampanye Double Barrel dan TokHang sebagai kampanye memerangi narkoba. Pelaksanaan hukuman mati pada kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte dapat diindikasikan bahwa terdapat kejahatan atas kemanusiaan. Pasalnya dalam pelaksanaanya Presiden Rodrigo tidak menggunakan dasar hukum terhadap ribuan jiwa terdakwa dan tersangka narkoba yang terbunuh dan mengabaikan komitmennya terhadap perlindungan HAM baik dinegaranya maupun di kancah internasional.

Oleh karena itu, HRW melakukan upaya-upaya dalam meneggakkan HAM di Filipina dengan mengimplementasikan konsep TAN. Konsep ini menjelaskan strategi yang dapat dilakukan oleh suatu jaringan dalam mewujudkan tujuan mereka. Pada penulisan ini, HRW melakukan upaya dengan menggunakan dua strategi yaitu, pertama, *Information politics*. Strategi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta mendramatisir fakta melalui pernyataan-pernyataan korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian. HRW melalui laporan investigasi yang berjudul "*License to Kill*": *Philippine Police Killings in*

Duterte's "War on Drugs" dan melalui media Asia Times menunjukkan fakta adanya pelanggaran terhadap HAM pada korban terbunuh dengan adanya kesaksian yang berbeda antara pihak kepolisian Filipina dan saksi mata korban dari keluarga dan tetangga korban yang menyebutkan adanya implementasi kebijakan yang tidak didasarkan pada proses hukum.

Kedua, *Accountability politics*, yaitu strategi untuk selalu mengingatkan pemerintah agar mempertanggungjawabkan kebijakannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. HRW membuktikan bahwa Filipina adalah negara yang meratifikasi perjanjian terkait HAM salah satunya adalah DUHAM. Namun dalam pernyataan Presiden Rodrigo Duterte menjelaskan bahwa Presiden Rodrigo Duterte tidak memperdulikan perhatian internasional dalam menjalankan kebijakannya. Dengan melakukan strategi ini, dunia internasional menaruh perhatian pada kebijakan Presiden Rodrigo Duterte seperti *United Nations (UN)*, *International Criminal Court (ICC)*, Uni Eropa, dan Amerika Serikat yang turut mendesak Presiden Rodrigo Duterte untuk memperhatikan HAM pada implementasi kebijakan *war on drugs*.

Jadi, dengan mengkaji adanya pelanggaran HAM pada kebijakan *war on drugs* Presiden Rodrigo Duterte, HRW melakukan langkah advokasi sebagai upaya menegakkan HAM sesuai dengan tujuan dan misi HRW untuk melindungi HAM diseluruh dunia dan menekan adanya perubahan terhadap para pelaku pelanggaran HAM. *Strategi Information politics* dan *Accountability politics* diambil sebagai upaya yang dapat HRW lakukan dalam mempengaruhi Presiden Rodrigo Duterte untuk melakukan perubahan dalam kebijakannya untuk lebih memperhatikan HAM.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan. Dikarenakan keterbatasan pada proses penelitian yang hanya mengacu pada studi pustaka, diharapkan adanya kritik dan saran yang

membangun untuk penulisan ini lebih baik. Penulis juga berharap penulisan ini dapat dikaji lebih lanjut agar segala kekurangan yang terdapat dipenulisan ini dapat diperbaiki dan semoga pada penulisan ini memberikan manfaat yang dapat disebarluaskan.